

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antara Armenia dan Azerbaijan yang berkaitan dengan wilayah Nagorno-Karabakh, atau dapat disebut konflik Nagorno-Karabakh, telah memulai babak yang baru setelah mengalami konflik berkepanjangan selama tiga dekade. Armenia dan Azerbaijan setuju untuk mengakhiri konflik tersebut dengan komitmen untuk segera melanjutkan diskusi damai serta normalisasi perbatasan setelah diadakannya pertemuan tiga kubu antara Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, serta Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel di Brussel, Belgia pada tanggal 23 Mei 2022 (Consilium Europa, 2022). Sikap yang mengarah kepada diskusi damai serta normalisasi perbatasan yang diambil oleh Armenia ini sangat bertolak belakang dengan sikap serta kebijakan luar negeri Armenia terhadap konflik Nagorno-Karabakh selama tiga dekade terakhir. Armenia cenderung menolak jalur damai dan menggunakan jalur militer, menginginkan wilayah Nagorno-Karabakh untuk memilih pilihannya sendiri dalam hal bergabung atau tidaknya dengan Armenia dari Azerbaijan, bahkan hingga mendukung terjadinya unifikasi antara Armenia dengan wilayah Nagorno-Karabakh (Weise, Cienski, & Herszenhorn, 2020).

Perubahan sikap yang terjadi pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Nikol Pashinyan ini membuat kecewa masyarakat Armenia yang mayoritas mendukung wilayah Nagorno-Karabakh untuk menentukan sikapnya sendiri, dimana pemerintah Armenia mengkritik Perdana Menteri Pashinyan terlalu lembut dan halus terhadap konflik ini dan bahkan masyarakat Armenia menyebut Nikol Pashinyan sebagai pengkhianat karena terkesan seperti menyerahkan begitu saja wilayah Nagorno-Karabakh yang selama ini sudah diperjuangkan kepada Azerbaijan (Deutsche Welle, 2022).

Sikap Armenia yang tiba-tiba menyetujui diadakannya jalur damai melalui diskusi untuk konflik Nagorno-Karabakh sendiri sebenarnya merupakan terusan dari terlaksananya perjanjian damai yang mengakhiri konflik yang dimediasi oleh Rusia 9 November 2020 (BBC Indonesia, 2020). Pada perjanjian damai tersebut, masyarakat Armenia sebenarnya sudah menentang langkah Armenia tersebut yang dapat dibuktikan dengan serangkaian aksi protes di Ibu Kota Yerevan beberapa saat setelah perjanjian damai tersebut ditandatangani. Perjanjian damai serta komitmen untuk menormalisasi hubungan serta perbatasan dianggap sebagai kekalahan Armenia pada konflik Nagorno-Karabakh karena Armenia kehilangan kontrol atas wilayah yang sudah dikuasainya sejak 1994.

Padahal jika dilihat dari sikap Armenia sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut, Armenia konsisten membela Nagorno-Karabakh yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menentukan nasibnya sendiri, bahkan berusaha untuk mengunifikasi Armenia dan Nagorno-Karabakh dalam langkahnya mencapai *United Armenia*. *United Armenia* atau dikenal juga sebagai *Greater Armenia* sendiri merupakan sebuah konsep dan ide yang mencoba menyatukan atau mengunifikasi wilayah yang secara historis merupakan bagian dari Armenia serta wilayah yang hingga saat ini mayoritasnya dihuni oleh etnis Armenia, termasuk diantaranya adalah wilayah Nagorno-Karabakh. Konsep ini sudah dikenalkan dan disebar oleh beberapa partai politik di Armenia seperti partai *Armenian Revolutionary Federation* serta partai *Heritage* (International Crisis Group, 2004). Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Armenia untuk mencapai *United Armenia* sendiri diantaranya adalah terjadinya dukungan terhadap referendum yang terjadi di Nagorno-Karabakh untuk menjadi bagian dari Armenia pada tahun 1988, pendudukan Nagorno-Karabakh yang dilakukan sejak 1994, serta bantuan militer kepada Nagorno-Karabakh dan bahkan terjun langsung melawan Azerbaijan sejak 1991 hingga 2020 dimana Azerbaijan sendiri mencoba menghentikan upaya pemisahan diri yang dilakukan oleh Nagorno-Karabakh (Fatoni, 2019).

Konflik Nagorno-Karabakh sendiri merupakan sebuah konflik perebutan wilayah yang melibatkan Armenia dan Azerbaijan terhadap wilayah Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh secara geografis terletak di wilayah Kaukasus, yaitu di antara benua Asia dan Eropa. Dalam sejarahnya etnis Armenia memiliki pengaruh yang sangat besar di wilayah Nagorno-Karabakh. Mayoritas populasi yang tinggal di wilayah Nagorno-Karabakh sendiri merupakan etnis Armenia dengan angka mencapai 99% dari total jumlah populasi yang ada di Nagorno-Karabakh (Council on Foreign Relations, 2021). Namun wilayah Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai wilayah kedaulatan Azerbaijan. Sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh sendiri dikuasai oleh *Republic of Artsakh*, yaitu sebuah entitas yang terdiri dari etnis Armenia yang berada di wilayah Nagorno-Karabakh yang mencoba memproklamasikan kemerdekaan dan melepaskan diri dari Azerbaijan. Azerbaijan sendiri bersikeras mempertahankan wilayah Nagorno-Karabakh agar tidak melepaskan diri. Sementara Armenia mendukung Republik Artsakh agar bisa melepaskan diri dari Azerbaijan dengan mengirimkan bantuan militer meskipun Armenia sendiri tidak secara resmi mengakui Republik Artsakh sebagai sebuah negara berdaulat.

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik berkepanjangan dimana konflik perebutan wilayah ini sudah terjadi sejak awal tahun 1900-an. Tercatat pada awal tahun 1920-an Uni Soviet pimpinan Stalin yang baru saja memiliki kedaulatan atas Armenia dan Azerbaijan pada saat itu membuat garis perbatasan baru bagi Armenian SSR dan Azerbaijan SSR (Weise, Cienski, & Herszenhorn, 2020). Uni Soviet kemudian membuat wilayah Nagorno-Karabakh sebagai wilayah otonomi khusus dan memberikan kontrol atas wilayah Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan (Cornell, 1997). Keputusan ini kemudian dipertanyakan mengingat wilayah Nagorno-Karabakh sendiri sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia. Etnis Armenia meminta agar mereka dimasukkan ke dalam wilayah Armenia, namun permintaan tersebut ditolak. Di bawah kepemimpinan Uni Soviet, keputusan tersebut tidak terlalu

menimbulkan kegaduhan dan konflik bersenjata (Weise, Cienski, & Herszenhorn, 2020).

Konflik mulai memanas pada saat Uni Soviet mulai goyah yaitu sekitar akhir 1980-an. Pada tahun 1988 terjadi sebuah referendum di Nagorno-Karabakh oleh parlemen regional Nagorno-Karabakh. Referendum tersebut menghasilkan sebuah hasil voting yang menyatakan bahwa Nagorno-Karabakh bergabung menjadi bagian dari Armenia. Masyarakat Armenia mendukung adanya referendum tersebut agar unifikasi antara Armenia dan Nagorno-Karabakh bisa terlaksana (Fatoni, 2019). Kemudian saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Armenian SSR dan Azerbaijan SSR resmi memisahkan diri dari Uni Soviet dan menjadi negara berdaulat. Namun di tahun yang sama wilayah otonomi Nagorno-Karabakh mendeklarasikan kemerdekaannya secara resmi (Council on Foreign Relations, 2021).

Adanya deklarasi kemerdekaan ini kemudian memicu ketegangan antara Azerbaijan yang mencoba untuk mempertahankan salah satu bagian dari wilayah kedaulatannya melawan etnis Armenia yang ada di Nagorno-Karabakh. Azerbaijan mencoba untuk melawan dan meredakan gerakan separatis yang ada di wilayah Nagorno-Karabakh. Ketegangan ini kemudian berujung dengan terjadinya peperangan antara kedua belah pihak, dengan Armenia mendukung Nagorno-Karabakh melawan Azerbaijan (Praestu, 2020). Perang antara Azerbaijan dengan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh yang dibantu oleh Armenia berlangsung hingga 1994. Armenia berhasil menguasai wilayah Nagorno-Karabakh dan memukul mundur pasukan Azerbaijan dari wilayah tersebut (Council on Foreign Relations, 2021). Pendudukan Armenia atas wilayah ini membuat ratusan ribu masyarakat yang ada di Nagorno-Karabakh, terutama yang beretnis Azerbaijan, harus mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka. Selain itu puluhan ribu penduduk juga harus kehilangan nyawa atas adanya konflik ini (Fatoni, 2019).

Konflik mulai mereda pada tahun 1994 ketika ditandatanganinya perjanjian damai dan gencatan senjata oleh Armenia, Azerbaijan, dan perwakilan Nagorno-Karabakh. Perjanjian yang ditandatangani di Bishkek ini dimediasi oleh Rusia, dimana Rusia juga terlibat dalam upaya resolusi konflik dengan membuat 49 pos pengamatan dan juga mengirimkan pasukan penjaga perdamaian sebanyak 1800 pasukan sebagai upaya pencegahan meletusnya konflik setelah adanya perjanjian damai dan gencatan senjata ini (Dewantara & Yamin, 2019). Penandatanganan perjanjian damai ini membuat wilayah Nagorno-Karabakh tetap berada dibawah kedaulatan Azerbaijan. Akan tetapi wilayah Nagorno-Karabakh diatur oleh kelompok separatis dari etnis Armenia yang mendeklarasikan diri menjadi Republik Artsakh dan didukung oleh pemerintah Armenia (BBC News, 2020).

Setelah ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata ini, konflik Nagorno-Karabakh ini memasuki fase yang disebut sebagai *frozen conflict*. Maksud dari *frozen conflict* ini adalah situasi dimana aktivitas militer dan peperangan berhasil untuk diredam, namun pihak yang berkonflik masih belum puas dengan adanya perjanjian yang ada sehingga masih terdapat potensi konflik untuk kembali terjadi (Council on Foreign Relations, 2021). Situasi ini terjadi pada konflik Nagorno-Karabakh semenjak perjanjian gencatan senjata tahun 1994 ditandatanganinya. Walaupun beberapa kali terjadi pertempuran kecil dan juga saling penembakan senjata antara keduanya, namun tidak ada pertempuran fatal yang bisa menaikkan kembali tensi konflik (Council on Foreign Relations, 2021). Setidaknya situasi ini terus bertahan hingga tahun 2010-an ketika tensi konflik mulai naik lagi. Tercatat ada beberapa kali pelanggaran gencatan senjata, contohnya adalah seperti yang terjadi pada tahun 2016 dimana terjadi baku tembak selama empat hari dan melibatkan berbagai persenjataan berskala besar seperti tank dan artileri berkaliber besar (Fatoni, 2019). Baku tembak ini kemudian menewaskan belasan orang dan melukai lebih dari 300 orang.

Konflik kembali memuncak pada tahun 2020. Konflik pecah pada akhir September 2020 dimana terjadi bentrokan dan pertarungan antara Armenia dan Azerbaijan. Kemudian kedua belah pihak saling tuduh-menuduh pihak mana yang memulai serangan terlebih dahulu (Lisbet, 2020). Tensi semakin memanas ketika aksi saling tembak menembak berubah menjadi aksi serangan menggunakan senjata jarak jauh dan senjata berskala besar lainnya (BBC Indonesia, 2020). Pada pertempuran tahun 2020 ini Azerbaijan berhasil menekan Armenia dan merebut beberapa kota yang sebelumnya dikuasai oleh Armenia. Hingga pada akhirnya Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk berdamai setelah adanya perjanjian damai yang dimediasi oleh Rusia pada tanggal 9 November 2020 (BBC Indonesia, 2020). Perjanjian damai ini seakan menghasilkan kemenangan bagi Azerbaijan karena dalam kesepakatan tersebut Azerbaijan akan mendapatkan kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang selama ini dikuasai oleh Armenia. Armenia bisa dibilang menyerahkan wilayah Nagorno-Karabakh karena Armenia setuju untuk menarik pasukannya dari wilayah Nagorno-Karabakh dan wilayah sekitarnya yang berada di bawah kedaulatan Azerbaijan.

Pasca terjadinya perjanjian damai yang dimediasi oleh Rusia, masih terdapat beberapa konflik bersenjata berskala kecil walaupun terdapat juga beberapa upaya untuk mengurangi tensi militer pada wilayah Nagorno-Karabakh tersebut. Pada 4 Desember 2021 Azerbaijan membebaskan 10 tentara Armenia yang telah ditangkap sebelumnya, namun masih terjadi beberapa kontak senjata berskala kecil seperti yang terjadi pada 9 Desember 2021 dimana 1 tentara Azerbaijan terbunuh dan pada 10 Desember 2021 1 tentara Armenia terbunuh (Reuters, 2021). Pada Maret 2022 tensi agak sedikit memanas ketika pipa gas yang menghubungkan Armenia dan Nagorno-Karabakh rusak sehingga akses pipa gas di Nagorno-Karabakh terputus dan menyebabkan wilayah tersebut menghadapi krisis humaniter. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mizoryan, serta pemerintah Nagorno-Karabakh sempat menuduh hal ini disengaja oleh

pemerintah Azerbaijan (TASS Russian News Agency, 2022). Namun pada akhirnya tensi tersebut berhasil mereda setelah diadakan pertemuan dan diskusi damai trilateral antara Armenia, Azerbaijan, dan Dewan Uni Eropa yang bersama-sama berkomitmen untuk meredakan ketegangan di wilayah perbatasan, membuka kembali jalur transportasi yang sebelumnya ditutup antara kedua negara, serta memastikan hak dan keamanan etnis Armenia di wilayah tersebut (Consilium Europa, 2022).

Jika dilihat dari runtutan konflik, Armenia secara konsisten selalu mendukung Republik Artsakh sejak awal konflik hingga perjanjian damai pada tahun 2020. Hal ini bisa dilihat ketika Armenia dan masyarakatnya mendukung adanya referendum yang terjadi pada tahun 1988 yang menginginkan masuknya wilayah Nagorno-Karabakh menjadi bagian Armenia. Selain itu Armenia berperang melawan Azerbaijan antara tahun 1988 sampai 1994 memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh bersama dengan Republik Artsakh. Dari keterlibatan tersebut secara sekilas Armenia seperti menginginkan wilayah Nagorno-Karabakh. Namun Armenia juga mendukung ketika Nagorno-Karabakh mendeklarasikan diri untuk merdeka pada tahun 1991. Armenia juga mendukung dan membantu Republik Artsakh dalam perjuangannya memisahkan diri dari Azerbaijan. Akan tetapi disaat yang bersamaan Armenia tidak mengakui Republik Artsakh sebagai sebuah negara merdeka.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi pada faktor tindakan keterlibatan Armenia pada konflik ini adalah fakta bahwa wilayah Nagorno-Karabakh mayoritas dihuni oleh etnis Armenia. Hak untuk memilih pilihannya sendiri serta keamanan bagi Nagorno-Karabakh dan penduduknya yang mayoritas merupakan bangsa Armenia merupakan salah satu hal yang sering ditekankan oleh Armenia setelah ditandatangani perjanjian damai pada 9 November 2021. Dalam diskusi damai bersama Azerbaijan dan Dewan Uni Eropa pada 23 Maret 2022, Armenia mengharapkan adanya jaminan hak dan kebebasan

terhadap etnis Armenia yang hidup di Nagorno-Karabakh. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mizoryan menyatakan bahwa konflik Nagorno-Karabakh sejatinya merupakan permasalahan pemastian hak untuk menentukan pilihannya sendiri oleh etnis Armenia di Nagorno-Karabakh (Kucera, 2022). Pada tulisan kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai faktor dan alasan keterlibatan Armenia pada konflik Nagorno-Karabakh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan tentang keterlibatan Armenia pada konflik Nagorno-Karabakh, penulis tertarik untuk meninjau secara rinci mengenai faktor keterlibatan Armenia pada konflik Nagorno-Karabakh serta alasan Armenia menginginkan adanya jaminan hak memilih pilihannya sendiri bagi Nagorno-Karabakh. Maka, rumusan masalah yang digunakan pada studi kasus ini adalah “Mengapa Armenia membantu Nagorno-Karabakh untuk mendapatkan hak menentukan pilihannya sendiri terkait kedaulatannya dan terlibat melawan Azerbaijan pada konflik Nagorno-Karabakh?”

C. Kerangka Teoretik

1) Iredentisme

Dalam mencari tahu alasan Armenia terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh serta dukungannya terhadap Republik Artsakh, penulis menggunakan konsep Iredentisme. Kata iredentisme sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu *terra irredenta* yang berarti wilayah atau tanah yang akan dibebaskan atau didapatkan kembali (Kornprobst, 2008). Ada beberapa ahli yang mencoba mendefinisikan apa itu iredentisme. Salah satunya adalah Thomas Ambrosio dalam bukunya yang berjudul *Irredentism: Ethnic Conflict and International Politics*. Thomas Ambrosio menjelaskan bahwa iredentisme merupakan percobaan yang dilakukan oleh sebuah negara yang berdaulat untuk mengklaim atau mengambil wilayah kedaulatan negara lain yang ditinggali oleh sebangsanya (Ambrosio, 2001). Artinya iredentisme ini merupakan aksi

klaim wilayah kedaulatan negara lain yang didasari oleh persamaan etnis, bangsa, hingga aspek sejarah lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut, aktor yang melakukan upaya iredentis adalah negara yang berdaulat. Sementara untuk alasan dari tindakan iredentis sendiri adalah untuk membebaskan atau mendapatkan kembali masyarakat yang memiliki kesamaan etnis serta wilayah yang ditinggali oleh etnis tersebut yang secara kedaulatan merupakan milik negara lain. Pada kasus iredentisme, klaim terhadap wilayah kedaulatan negara lain harus memiliki hubungan berupa persamaan etnis antara penduduk pada wilayah tersebut dengan negara asal atau negara yang melakukan upaya iredentis tersebut (Kornprobst, 2008). Pada beberapa kasus, upaya iredentisme dapat berbentuk upaya unifikasi atau penyatuan antara negara yang melakukan upaya tersebut dengan wilayah yang akan diklaim. Sebagian upaya klaim atas wilayah yang didasari oleh persamaan etnis atau kedekatan sejarah adalah dengan menambahkan kata "*Greater*" sebelum nama negara yang melakukan upaya iredentis tersebut. Nama negara bertindak sebagai pusat atau inti yang merupakan aktor iredentis dan kata "*Greater*" mengacu kepada wilayah kedaulatan negara lain yang diklaim oleh aktor iredentis, dimana contohnya adalah Greater Albania, Greater Serbia, dan Greater Armenia (Kornprobst, 2008).

Jika dilihat dari pengertiannya, iredentisme sendiri berbeda dengan separatisme. Baik iredentisme dan separatisme sama-sama mengancam integritas teritori wilayah suatu negara karena berpotensi kehilangan wilayahnya yang ingin memisahkan diri atau bergabung dengan negara lain. Walaupun iredentisme mirip dengan separatisme, namun iredentisme memiliki perbedaan yang cukup untuk membuat konsep iredentisme bisa dijadikan sebuah konsep sendiri. Separatisme sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok bangsa yang mendiami suatu wilayah untuk memisahkan diri dari negara yang memiliki kedaulatan dari wilayah yang didiami tersebut (Ambrosio, 2001). Perbedaan

yang mendasar dari iredentisme dan separatisme menurut Donald Horowitz adalah terletak pada hasil akhirnya. Jika separatisme adalah upaya untuk memisahkan diri saja, iredentisme merupakan upaya untuk pelepasan diri dari satu negara menjadi milik negara lain (Ambrosio, 2001). Jadi ciri khas dari iredentisme ini sendiri adalah aktornya dimana separatisme dilakukan oleh aktor non-negara namun iredentisme dilakukan oleh negara berdaulat untuk mengambil alih wilayah negara berdaulat yang lain atas dasar hubungan etnis.

Pada konflik Nagorno-Karabakh, upaya iredentis dilakukan oleh Armenia terhadap wilayah Nagorno-Karabakh. Armenia berperan sebagai aktor iredentis dengan wilayah Nagorno-Karabakh merupakan wilayah yang diklaim oleh Armenia. Selaras dengan konsep iredentisme, alasan klaim Armenia terhadap Nagorno-Karabakh adalah berdasarkan persamaan etnis serta aspek sejarah yang ada antara Armenia dan Nagorno-Karabakh. Armenia berupaya untuk melakukan unifikasi atau penyatuan wilayah antara Armenia dan Nagorno-Karabakh. Wilayah Nagorno-Karabakh memang merupakan sebuah wilayah yang secara resmi masuk dalam wilayah kedaulatan Azerbaijan, namun pada wilayah Nagorno-Karabakh sendiri mayoritas etnisnya adalah etnis Armenia dengan jumlah mencapai 99% dari total penduduk Nagorno-Karabakh (BBC Indonesia, 2020).

Upaya Armenia yang mencoba untuk mengunifikasi Armenia dan Nagorno-Karabakh berdasarkan faktor etnis tersebut bisa dikatakan sebagai upaya iredentis yang dilakukan oleh Armenia. Selain faktor etnis, faktor sejarah juga merupakan dasar klaim Nagorno-Karabakh oleh Armenia. Nagorno-Karabakh beberapa kali sempat masuk ke dalam kedaulatan kerajaan Armenia sebagai provinsi dengan nama Artsakh (Dudwick, 1990). Alasan klaim Armenia terhadap Nagorno-Karabakh tertuang pada konsep *United Armenia* atau *Greater Armenia* yang merupakan gagasan unifikasi wilayah Armenia dengan wilayah yang mayoritas dihuni oleh etnis

Armenia atau secara historis merupakan bagian dari Armenia, termasuk salah satu diantaranya adalah wilayah Nagorno-Karabakh.

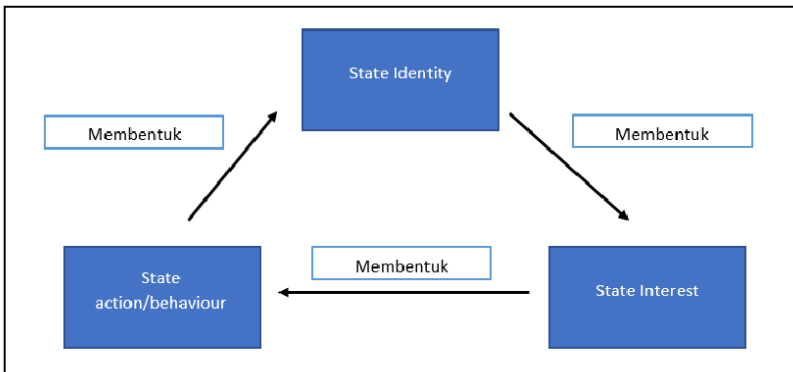
2) Teori State Identity

Untuk menjelaskan alasan keterlibatan Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh dan alasan Armenia bersedia membela entitas negara *self-proclaimed* yang mayoritas populasinya beretnis Armenia di Nagorno-Karabakh yaitu Republik Artsakh, penulis akan menggunakan teori *state identity*. Teori *state identity* sendiri termasuk ke dalam pendekatan konstruktivisme, dimana konstruktivis sendiri memandang bahwasanya tindakan dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu aktor di hubungan internasional dipengaruhi oleh gagasan atau karakteristik dari aktor tersebut (Swastika, 2017). Pada teori *state identity*, gagasan atau karakteristik yang mempengaruhi tindakan dan kebiasaan suatu aktor dalam hubungan internasional adalah identitas dari aktor tersebut. Identitas sendiri merupakan gambaran khusus yang ditunjukkan dan melekat pada sebuah aktor (Margareth & Rosyid, 2017). Dalam konteks hubungan internasional sendiri, identitas yang berupa gambaran khusus juga dapat melekat pada sebuah aktor hubungan internasional terutama negara. Suatu negara akan dipandang oleh negara lain melalui gambaran khusus yang melekat pada negara tersebut.

Sementara itu menurut Alexander Wendt dalam bukunya yang berjudul "*Social Theory of International Politics*", identitas merupakan sifat atau ciri yang dimiliki oleh sebuah aktor internasional yang dapat mempengaruhi tindakan dan kebiasaan dari aktor tersebut (Wendt, 2000). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan dan juga tindakan yang dilakukan oleh sebuah aktor dipengaruhi oleh identitas dari aktor tersebut. Dalam konteks negara, maka identitas nasional dari negara tersebutlah yang mendorong terbentuknya kepentingan nasional dan kebijakan yang akan diambil. Identitas nasional yang terbentuk di suatu negara kemudian akan membentuk kepentingan nasional negara

tersebut. Kemudian negara akan bertindak dan melakukan tindakan pada ranah internasional demi mencapai kepentingan tersebut. Mekanisme tersebut tertuang pada teori *state identity* yang menjelaskan bagaimana identitas nasional dapat mempengaruhi kebiasaan atau kebijakan luar negeri suatu negara. Melalui definisi dari Alexander Wendt dan juga penjelasan di atas, teori *state identity* dapat dimodelkan sebagai berikut:

Gambar 1 Model Teori *State Identity*



Model di atas dapat mempermudah memahami dan menggambarkan bagaimana cara teori *state identity* menjelaskan pengaruh identitas negara terhadap pengambilan suatu keputusan atau kebijakan politik suatu negara. *State identity* atau identitas nasional merupakan gambaran khusus yang melekat pada sebuah negara. Identitas nasional yang mempengaruhi tindakan suatu negara biasanya bersifat tidak tetap. Identitas nasional akan berubah-ubah dan mengikuti aktor yang berinteraksi pada suatu kasus tertentu (Rosyidin, 2010). Artinya identitas suatu negara akan dipandang berbeda baik oleh dirinya sendiri ataupun aktor lain tergantung dari kasus atau hubungan yang dihadapinya. Hal ini membuat identitas nasional bersifat intersubyektifis dimana tiap-tiap aktor akan memberikan makna terhadap aktor-aktor lain sesuai dengan kasus yang mereka tengah hadapi (Wendt, 2000). Oleh karena

identitas dapat berbeda tergantung kasus serta aktor yang dihadapi, maka negara dapat memiliki berbagai identitas nasional yang bergantung kepada konteks atau hubungan yang tengah dialami.

Alexander Wendt dalam bukunya menjelaskan ada empat jenis identitas yaitu identitas personal (*corporate or personal identity*), identitas golongan (*type identity*), identitas peran (*role identity*), dan juga identitas bersama (*collective identity*). Identitas personal sendiri merupakan identitas yang terdiri dari komponen bersifat tetap atau stabil yang membedakan antara suatu negara dengan negara yang lain. Contoh dari identitas ini adalah wilayah, lambang negara, lagu kebangsaan, dan juga nasionalisme. Identitas golongan sendiri merupakan label atau kategorisasi yang membuat negara-negara memiliki persamaan karakteristik. Menurut Wendt karakteristik yang dimaksud bisa berupa penampilan fisik, sikap, nilai, bahasa, pendapat, pengalaman, kemiripan sejarah, hingga tempat lahir (Wendt, 2000). Kemudian ada identitas peran yang merupakan identitas berdasarkan peran yang diperlihatkan oleh suatu negara menghadapi negara-negara lain yang memiliki identitas yang berbeda (*counter-identities*) dalam sistem internasional. Sementara itu identitas kolektif merupakan identitas dimana batasan antara diri sendiri dan yang lain menjadi kabur. Identitas ini melihat kumpulan negara sebagai sebuah satu kesatuan pribadi dan akan bertindak demi kepentingan bersama.

Pada teori ini disebutkan bahwa kepentingan dan kebiasaan suatu negara dipengaruhi oleh gagasan atau karakteristik yang dimiliki oleh aktor tersebut. Maka identitas nasional kemudian akan membentuk dan mempengaruhi kepentingan nasional suatu negara. Selanjutnya negara akan menjalankan aksi dan kebiasaannya di dalam hubungan internasional sesuai dengan kepentingan nasionalnya yang akan dilindungi dan diperjuangkan. Kemudian tindakan yang sudah dilakukan tadi akan secara tidak langsung membentuk identitas baru bagi negara tersebut. Begitulah teori *state identity* ini

menjelaskan bagaimana sebuah negara mengambil suatu keputusan atau kebijakan politik yang didasari atas identitas nasionalnya.

Dalam kasus ini, teori *state identity* cocok untuk menjelaskan keterlibatan Armenia pada konflik ini. Penulis mengidentifikasi jenis identitas yang dimiliki oleh Armenia berdasarkan dari jenis-jenis identitas yang dikemukakan oleh Alexander Wendt serta melalui hubungan yang dimiliki oleh Armenia terhadap setiap aktor yang terlibat pada konflik ini untuk mengidentifikasi identitas nasional Armenia. Jenis identitas menurut Alexander Wendt yang dapat digunakan adalah identitas golongan yang merupakan label atau kategorisasi yang membuat negara-negara memiliki persamaan karakteristik yaitu kesamaan antara Armenia dan Republik Artsakh melalui persamaan etnis, bahasa, dan budaya Armenia. Penulis juga menggunakan hubungan terhadap aktor lain yaitu Azerbaijan dan Turki dimana etnis Armenia memiliki hubungan yang tidak baik dengan Azerbaijan dan Turki sebagai sesama negara beretnis Turk. Azerbaijan dan Turki sendiri memiliki kedekatan erat hingga Turki menyebut jika hubungan antara Turki dan Azerbaijan sebagai “*one nation, two states*” (France 24, 2020).

Jika melihat dari aktor-aktor tersebut, maka identitas nasional Armenia adalah negara tempat etnis Armenia berada. Hal ini dikarenakan adanya hubungan etnis dan budaya yang erat antara Armenia dan Republik Artsakh serta hubungan antara Azerbaijan dan Turki. Berdasarkan identitas nasional tersebut, maka kepentingan nasional Armenia akan terbentuk, yaitu untuk membantu Republik Artsakh sebagai saudara sebangsa memukul mundur tentara Azerbaijan dan Turki guna memisahkan diri dari Azerbaijan agar kemudian dapat dilakukan unifikasi antara Armenia dan wilayah Nagorno-Karabakh. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut maka Armenia akan melakukan tindakan. Dengan adanya upaya militer Azerbaijan meredam pemisahan diri Republik Artsakh, maka tindakan yang akan dilakukan oleh Armenia adalah

menurunkan kekuatan militernya bersama dengan Republik Artsakh dan terlibat langsung pada konflik bersenjata melawan Azerbaijan dan sekutunya.

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan ini, penulis dapat mengambil hipotesa yaitu:

- 1) Armenia melalui gagasan *United Armenia* mencoba untuk menyatukan wilayah Nagorno-Karabakh dengan Armenia atas dasar kesamaan etnis. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa etnis Armenia di wilayah tersebut melalui Republik Artsakh mencoba untuk menentukan pilihannya sendiri atas kedaulatannya untuk menjadi negara berdaulat atau bergabung dengan Armenia.
- 2) Faktor identitas nasional Armenia sebagai negara bangsa Armenia menjadi alasan keterlibatan Armenia pada konflik Nagorno-Karabakh. Identitas ini didapat dari persamaan karakteristik etnis, bahasa, dan budaya antara Armenia dan Republik Artsakh serta hubungan antar aktor dimana lawan Armenia pada konflik ini yaitu Azerbaijan dan Turki memiliki persamaan etnis Turk dan juga kedekatan hingga kedua negara tersebut menyebut mereka sebagai “*one nation, two states.*” Identitas Nasional Armenia tersebut kemudian mempengaruhi kepentingan nasional dari Armenia yaitu membantu Republik Artsakh sebagai saudara sebangsa memukul mundur tentara Azerbaijan guna memisahkan diri dari Azerbaijan agar kemudian dapat dilakukan unifikasi antara Armenia dan wilayah Nagorno-Karabakh.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang membuat Armenia memperjuangkan dan mendukung wilayah Nagorno-Karabakh melawan Azerbaijan yang berkaitan erat dengan faktor etnis dimana Armenia dan

Nagorno-Karabakh sama-sama memiliki mayoritas penduduk beretnis Armenia. Adanya kesamaan etnis antara Armenia dan juga wilayah Nagorno-Karabakh memiliki pengaruh besar terhadap keterlibatan Armenia terutama kaitannya terhadap upaya iredentisme yang dilakukan oleh Armenia. Selain itu penelitian ini juga mencoba melihat faktor keterlibatan Armenia melalui pendekatan konstruktivis terutama bagaimana identitas nasional dari Armenia berpengaruh terhadap aksi yang dilakukan oleh Armenia pada konflik ini.

F. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

i) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode eksplanatif dan deskriptif. Penulis menggunakan metode eksplanatif untuk menjelaskan alasan Armenia ikut terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh. Pada dasarnya eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan berfungsi menjelaskan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Metode eksplanatif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah pada penelitian ini. Sementara metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini serta runtutan peristiwa konflik Nagorno-Karabakh.

ii) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui metode kualitatif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari pengkajian literatur yang berasal dari jurnal, buku, dan juga berita yang tersedia di internet.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tulisan ini akan terbagi menjadi 4 bab. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, tujuan penelitian, serta metode dan teknik pengumpulan data.

BAB II akan berisi hubungan dan sejarah etnis Armenia dan Republik Artsakh di wilayah Nagorno-Karabakh serta dinamika hubungan antara Armenia dengan aktor yang terlibat dalam konflik yaitu Republik Artsakh, Azerbaijan, dan juga Turki.

BAB III akan menjelaskan analisis dan menjawab rumusan masalah yaitu faktor keterlibatan Armenia pada konflik Nagorno-Karabakh melalui konsep iredentisme serta melalui teori *state identity*.

BAB IV akan berisi kesimpulan dari penjelasan dan juga analisis yang sudah dilakukan di bab-bab sebelumnya.